

**PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT TO GOVERNMENT* (G2G)
DI PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019**

Oleh: Jupri Ali Yenos

Email : jurpialiyenos@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/fax. 0761-63277

Abstract

The development of e-government to government (G2G) is an effort made by the government in the sustainability of e-government implementation in Indragiri Hulu Regency starting from the planning phase to the e-government maturation phase. Future developments carried out by the local government of Indragiri Hulu Regency are focused on integrating all SKPD in Indragiri Hulu Regency. With this, various information can be coordinated into one server with the intermediary of the Department of Communication and Information.

This study aims to determine the development of e-government to government (G2G) in the Indragiri Hulu Regency Government in 2019 and to determine the supporting factors and inhibiting factors for the development of G2G in the Indragiri Hulu Regency Government in 2019. The research location was carried out at the Communication and Information Office of Indragiri Hulu Regency. This study puts forward a qualitative approach with descriptive data analysis and reference to Indrajit's theory of e-government development.

The results of this study are that first, the development of e-government to government (G2G) in the Indragiri Hulu Regency Government in 2019 has been carried out less than optimally where the implementation of e-government to government (G2G) has not shown the stage of perfection. Support, capacity and value for developing e-government to government (G2G) still have problems. Second, the supporting factors for the development of e-government to government (G2G) in the Indragiri Hulu Regency Government include security, organizational culture, and training. While the inhibiting factors for the development of e-government to government (G2G) in the Indragiri Hulu Regency Government include People Power, Hardware and Organoware.

Keywords: Development, e-government to government (G2G)

PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkembang sangat cepat sehingga mampu membawa perubahan di segala bidang kehidupan secara umum terutama pada kapasitas kerja dan usaha. Proses globalisasi menjadi lebih cepat terwujud karena teknologi informasi dan komunikasi mampu menghilangkan jarak dan sekat waktu, arus informasi menjadi tidak terbendung yang mengalir sangat cepat. Yang pada akhirnya mampu merubah paradigma ekonomi, budaya, sosial.

Pada dasarnya implementasi konsep *e-government* merupakan sebuah tantangan transformasi. Fungsi teknologi informasi di dalam kerangka ini adalah tidak sekedar sebagai penunjang manajemen pemerintahan yang ada, tetapi justru merupakan *driver of change* atau sebagai hal yang justru menawarkan terjadinya perubahan-perubahan mendasar sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di era moderen. Konsep *e-government* bukanlah inisiatif yang mudah dan murah. Bukan pula sebuah obat atau jalan pintas menuju perbaikan melainkan hanyalah alat atau sarana menuju tujuan-tujuan tersebut. *E-government* tidak dapat dibangun dan diterapkan hanya dengan sekedar penyusunan peraturan/kebijakan dari pemerintah (pimpinan negara) semata tetapi perlu diawali dengan perubahan paradigma yang terjadi pada pemerintahan karena akan bersifat kompleks.

Melalui *e-government* terjadi perubahan pada birokrasi pemerintahan dalam rangka tercapainya *good governance*. Perubahan-perubahan tersebut antara

lain kegiatan birokrasi menjadi kreatif, inovatif, efisien dan efektif dengan sistem terbuka, kompetitif dan profesional untuk mewujudkan visi misi pemerintahan melalui struktur birokrasi yang ramping, transparan dan fleksibel. Kecenderungan yang menjadi pendorong berkembangnya konsep *e-government* mengakibatkan adanya tantangan besar yang harus dihadapi dalam menjalankan *e-government*.

Pengembangan *e-government* pada lembaga pemerintah harus mengacu pada tahapan pengembangan *e-government* secara nasional. Penerapan *e-government* di Indonesia difokuskan pada pembuatan berbagai aplikasi yang terintegrasi, pengembangan proses layanan *e-government* yang efektif dan efisien, dan penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik (*best practice*) yang meliputi:

1. *Government to Government* (G2G)
2. *Government to Business* (G2B)
3. *Government to Citizen* (G2C)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat pembagian urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah

kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Komunikasi dan informatika merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara eksplisit pembagian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota adalah Pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Oleh karena itu untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya di bidang komunikasi dan informatika, Bupati dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan Daerah.

Pengembangan *e-government* ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengembangan *e-government* memiliki berbagai komponen berupa sumber daya manusia (termasuk struktur, fungsi dan kompetensi), infrastruktur jaringan, sistem aplikasi, infrastruktur data dan informasi, tata kelola TIK, GCIO (*Government Chief Information*

Officer), kebijakan dan prosedur serta pendanaan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2016 yang menjadi leading sektor untuk pengembangan aplikasi adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi komunikasi dan informatika memiliki visi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi demi menuju Indragiri Hulu sejahtera.

Pembentukan Kantor Pengelolaan Data Elektronik (PDE) atau Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu untuk mempercepat proses penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Pemerintah mulai memikirkan dan melakukan perencanaan, pembangunan, dan pengembangan terhadap konsep *e-government* meski demikian, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Indragiri Hulu sudah pada tahap pengembangan dimana sebagian besar baru sebatas tahap pematangan, meskipun beberapa aplikasi berada pada tahap persiapan dan ada yang sudah ditahap pematangan. Pada dasarnya ada empat tahap pengembangan *e-government*, yakni: (1) Tahap persiapan; (2) Tahap pematangan; (3) Tahap pematangan dan; (4) Tahap pemanfaatan.

Prioritas pengembangan *e-government* di Kabupaten Indragiri Hulu secara umum dilakukan dengan beberapa tahapan diantara yaitu tahap pertama, *e-government* dikembangkan sebagai sarana

koordinasi dan kolaborasi antar SKPD untuk efisiensi dan efektifitas proses kerja. Tahap kedua, *e-government* dikembangkan sebagai sarana pelayanan informasi yang cepat, akurat dan up to date kepada masyarakat umum, serta pemerintah dan bisnis. Tahap ketiga *e-government* dikembangkan menjadi “integrated government” yang memiliki ciri adanya multiple transaksi yang efisien yang melibatkan antar berbagai instansi atau SKPD sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas layanan publik. Peranan Diskominfo Kabupaten Indragiri Hulu dalam pengembangan *e-government* dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Pengembangan G2G Kabupaten Indragiri Hulu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu dikelola oleh Bidang *E-Government*. Bidang ini bertanggung jawab dalam mengakumulasi data dan informasi dari beberapa SKPD langsung dibawah koordinasinya, dimana masing-masing SKPD harus saling bekerjasama khususnya dalam pertukaran data/informasi untuk mendukung pembuatan suatu kebijakan atau keputusan yang akurat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam hal ini konsep G2G yang digunakan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu adalah Government Resources Management System (GRMS) dimana konsep ini merupakan sekumpulan modul aplikasi untuk mendukung fungsi-fungsi internal dan layanan publik organisasi pemerintah, mengelola sumber daya pemerintahan, mengintegrasikan aktivitas birokrasi pemerintahan dari hulu sampai hilir (dari perencanaan, belanja,

pelaksanaan program, hingga evaluasi), mudah untuk saling diintegrasikan dalam satu sistem informasi.

Rencana program pengembangan *e-government* diusulkan melalui Rencana Strategi Diskominfo Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2021. Rencana strategi ini merupakan dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RENJA Dinas Kominfo, RKPD Dinas Kominfo dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder Dinas Kominfo Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Tabel 1 Rencana Program *E-Government* Diskominfo Kab. Inhu Tahun 2019

No	Kegiatan	% Anggaran
1	Ketersediaan jaringan komunikasi web Pemda Inhu	75
2	Ketersediaan dokumen pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi yang disusun	25
3	Pelatihan pendidikan sertifikasi SDM daerah dibidang komunikasi dan informasi	-
4	Penyebaran informasi pembangunan daerah ke media massa dan masyarakat	90
5	Program layanan penyediaan informasi publik Pemda	95
6	Program layanan penyelenggaraan komunikasi publik Pemda	80
7	Program layanan nama domain Pemda	80
8	Program layanan pengelolaan sengketa publik	-
9	Program layanan <i>e-government</i>	-
10	Program pengembangan data statistik/statistik daerah	100
11	Program pengelolaan SDM aparatur pemahaman persandian	30
12	Program pengelolaan SDM persandian untuk pengamanan informasi	30

Sumber : Diskominfo Kab. Inhu Tahun 2020

Tabel 1 di atas adalah rencana program *e-government* Dinas Kominfo Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 dengan persentase pendanaan/anggaran masih dibawah 100%, terlihat kegiatan pelatihan

pendidikan sertifikasi SDM daerah dibidang komunikasi dan informasi, program layanan pengelolaan sengketa publik, program layanan e-government tidak anggarkan oleh Pemerintah Daerah.

Ketersediaan SDM IT di setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu masih sedikit, dari total 43 SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan dan Kecamatan hanya 10 SKPD yang telah memiliki SDM TI. Dalam hal ini pengembangan e-government harus didukung oleh SDM yang ahli dan berkualitas.

Program pengembangan G2G yang ditargetkan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 yaitu tahap persiapan berkisar 0 – 25%, tahap pematangan berkisar 26 – 50%, tahap pematapan berkisar 51 -75% dan tahap pemanfaatan berkisar 76 – 100%. Pencapaian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat dari 10 program yang ditargetkan hanya terlaksana 4 program yaitu e-Planning, e-Budgeting, e-Procurement, e-Monev, sedangkan program yang sudah terintegrasi dari 4 program tersebut yaitu e-Budgeting (e-Nara), e-Planning dan e-Monev. Di dalam penelitian sebelumnya, salah satunya (Hidayat, Antol; Aisyah & Weningsih, 2019) mengungkapkan bahwa bahwa ada komitmen dari Pemkab Banyumas untuk pengembangan e-government dalam membuka ruang komunikasi dari segi kuantitas informasi, website yang ada belum dapat menyampaikan informasi yang komprehensif dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemkab Banyumas. Sehingga keintegrasian data masih belum terlaksana dengan baik.

Dalam hal ini peneliti menduga tidak terlaksananya program pengembangan G2G masih kurangnya komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam memaksimalkan pengembangan e-government antar SKPD.

Tabel 2 Keunggulan dan Kekurangan Penggunaan G2G pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

No	Keunggulan	Kekurangan
1	Dapat membentuk hubungan interaktif antar SKPD	Kultur berbagi belum ada Pola pikir masih sederhana (gagap teknologi).
2	Dapat membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan terjangkau.	Terbatasnya jumlah server dan sedikitnya software berlisensi karena mahal sumber daya manusia yang handal di bidang TI kurang
3	Dapat membentuk mekanisme dan saluran komunikasi dengan SKPD lainnya serta menyediakan fasilitas dialog publik.	Belum terintegrasinya database dan sistem aplikasi secara menyeluruh.
4	Dapat membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien.	Infrastruktur belum memadai dan tempat akses yang terbatas
5	Adanya e-government diharapkan pelaksanaan pemerintah akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Masih kurangnya penyeragaman perencanaan pengembangan aplikasi yang bersifat <i>mandatory</i> pada Cetak biru (Blueprint) dimana memuat standarisasi fungsi sistem aplikasi e-government bagi pengembangan sistem aplikasi e-government yang komprehensif, efisien dan efektif.S

Sumber : Diskominfo Kab. Inhu Tahun 2020

Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu harus sesuai dengan perencanaan pengembangan infrastruktur e-government yang terstruktur dan berkesinambungan tidak hanya dari segi penggunaan teknologi akan tetapi harus diiringi dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusianya serta prosedur-prosedur yang diperlukan untuk menjalankan dan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi tersebut. Jika hal

ini tidak dilakukan, dimungkinkan bisa terjadi suatu distorsi dimana masing-masing Satuan kerja Perangkat Daerah seperti Dinas, Badan, Biro, dan Kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melakukan perencanaan masing-masing yang mungkin saling tidak terhubung satu sama lainnya baik dalam penyediaan infrastruktur teknologi, sumber daya manusia serta prosedur-prosedur.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menarik bagi penulis untuk meneliti tentang “Pengembangan G2G Di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019”, peneliti bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengembangan G2G berjalan dengan baik atau tidak.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengembangan G2G di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pengembangan G2G di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengembangan G2G di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pengembangan G2G di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan teori-teori yang terkait dengan masalah penelitian ini.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi selanjutnya terkait pengembangan G2G di Pemerintahan Pemerintah Daerah.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam pengembangan G2G yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk selanjutnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengembangan G2G di Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu untuk selanjutnya.

KERANGKA TEORI

1. Konsep Pengembangan *E-Government*

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan (*evolution*) dan perubahan secara bertahap.

Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK *School of Government* untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh, yaitu: (Indrajit, 2006)

1) *Support*

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *e-government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *e-government*.

2) *Capacity*

Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” *e-government* terkait menjadi kenyataan.

3) *Value*

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*).

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan G2G

Menurut Luiz Anotonio Joia (2005) ada sejumlah faktor pendukung pengembangan G2G di suatu daerah yaitu: (Sirat, 2013)

1) Keamanan

Stephen Smith dan Rodger Jamieson mendefinisikan keamanan sistem informasi sebagai implementasi sebuah kebijakan yang efektif untuk

memastikan kerahasiaan, ketersediaan dan integritas dari informasi dan aset sehingga terhindar dari pencurian, pengrusakan, manipulasi dan perubahan. (Smith & Jamieson, 2005)

2) Budaya organisasi

Menurut David W. Wachira, budaya organisasi adalah manifestasi dari budaya (nilai, kepercayaan, asumsi, persepsi, norma perilaku, artifak, pola tingkah laku) yang memberikan arti pada perilaku seseorang dalam organisasi.

3) Pelatihan

Nurdin Nurdin, Rosemary Stockdale dan Helana Scheepers menyebut bahwa kurangnya pembelajaran dari pegawai merupakan salah satu penghambat dari adopsi dan implementasi *e-government*.

METODE PENELITIAN

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Saryono merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui penelitian kuantitatif.

Adapun yang menjadi Informan Penelitian ini adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Inhu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Inhu, Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Inhu, Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Inhu, Kepala Seksi Infrastruktur TIK Dinas Komunikasi dan Informatika

Kab. Inhu, Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Inhu.

HASIL PEMBAHASAN

1. Pengembangan G2G

Pada bab ini Peneliti akan mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengembangan G2G di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 dimana dalam hal ini menjelaskan tentang *electronic government* oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam pengembangan G2G di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif dengan menggunakan kajian teori pengembangan *e-government* oleh Indrajit (2006) meliputi:

a) *Support*

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari publik berbagai kalangan pejabat dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep G2G, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *e-government*.

1) *Political Will*

Dapat diketahui bahwa peraturan seputar pengembangan G2G telah dijalankan namun belum maksimal di Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya ketersediaan anggaran, sumber daya manusia ahli dan infrastruktur. Sedangkan kemauan setiap SKPD dalam mewujudkan

pengoptimalan pengembangan G2G yang terintegrasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu terbukti sudah ada dan ingin terealisasi dengan cepat dan baik. Hal ini dibuktikan sudah ada beberapa aplikasi SKPD yang telah terintegrasi baik yakni E-Penatausahaan Keuangan (SIMTUKD-SIDINDA) pada BPKAD, E-Project Planning (SIABANG) pada Bappeda, E-Paperless (E-Office) berupa layanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan E-Monev pada Bagian Pengembangan Infrastruktur BPKAD.

2) *Infrastruktur*

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan infrastruktur TIK yang memadai bukan lagi sebagai faktor penunjang melainkan sebagai faktor kunci penyelenggaraan G2G di Kabupaten Indragiri Hulu.

3) *Sosisialisasi*

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sosialisasi keintegrasian data dan informasi antar SKPD sudah dilakukan, namun pada penerapannya baru hanya melalui portal resmi SKPD dan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

b) *Capacity Pengembangan E-Government*

Penerapan G2G sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kemampuan (*capacity*) dari pemerintah setempat dalam mewujudkan *e government*. Kemampuan yang mempengaruhi

terlaksananya G2G di Kabupaten Indragiri Hulu adalah sumber daya manusia, sumber daya *financial*, dan ketersediaan infrastruktur.

1) Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu masih kurang, dan pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang tersedia. Sehingga hanya beberapa pegawai saja yang dapat menggunakan teknologi informasi.

2) Sumber Daya *Financial*

Anggaran merupakan permasalahan serius bagi pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu telah menyediakan anggaran pengembangan e-government yang tercantum dalam APBD. Namun dalam pelaksanaannya anggaran yang cair semakin menurun, bahkan pada tahun 2019 anggaran untuk kegiatan pelatihan pendidikan sertifikasi SDM daerah dibidang komunikasi dan informasi serta program layanan e-government tersebut tidak ada.

3) Ketersediaan Infrastruktur

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Infrastruktur TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Inhu dalam menunjang penerapan G2G di Kabupaten Indragiri Hulu menjelaskan bahwa ketersediaan infrastruktur masih belum memadai untuk

menghubungkan antar SKPD dan antar instansi yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.

c) *Value*

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu setelah diterapkannya G2G antara lain: meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional pelaksanaan pemerintahan yang nantinya berdampak baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun stakeholder. Bahwa mekanisme keintegrasian data antar SKPD di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui aplikasi G2G yang sudah terlaksana. *Network operating center* milik Kabupaten Indragiri Hulu merupakan tempat administrator yang mengawasi, memantau dan mengamankan jaringan komunikasi yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengembangan G2G Di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019

a) Faktor Pendukung Pengembangan G2G

1) Keamanan

Diskominfo Kabupaten Indragiri Hulu bertanggung jawab dalam mengamankan jaringan data, memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sumber informasi dalam lingkup Pemkab Inh serta pemantauan layanan dengan memastikan keamanan fisik dan integritas operasional sistem dan layanan di Data Center dengan CCTV, *Access*

Security dan Network Operating Center (NOC).

- 2) Budaya Organisasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu memiliki komitmen untuk mewujudkan *good governance* melalui G2G yang sejalan dengan visi dan misi yaitu “Mewujudkan *Smart City* yang Prima dalam penyelenggaraan Pemerintahan (*Government*), Pelayanan Publik (*Citizen*) dan Daya Beli (*Business*)”.
- 3) Pelatihan Keseriusan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam pengembangan G2G melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sangat tinggi yang dilihat dari program pelatihan yang direncanakan. Meskipun dalam realisasinya terdapat kendala dalam penganggaran dana.

b) Faktor Penghambat Pengembangan G2G

- 1) *Peopleware* Dinas Kominfo Kabupaten Indragiri Hulu seharusnya memiliki sumber daya yang handal yang selalu siap mendukung operasional data center selama 24 Jam sehari tanpa henti. Staf IT Keahlian dan pengalaman Staff data Center tersebut meliputi *System Analis, System Engineer, Network Engineer, Network Administrator* dan *Programmer*.
- 2) *Hardware* tujuan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu meningkat infrastruktur pendukung dan

keseimbangan pembangunan G2G. Adapun strateginya yaitu meningkatkan layanan, jangkauan dan akses terhadap keintegrasian informasi data termasuk konten yang sesuai dengan kebutuhan SKPD dan dapat diterima tepat waktu.

- 3) *Organoware* Kendala birokrasi dalam pengembangan G2G di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini ditandai dengan Kultur yang ada dalam tubuh birokrasi sipil masih sulit untuk berubah dikarenakan penilaian kemungkinan kehilangan yang akan dihasilkan dari penerapan *e-government* tersebut terhadap individu Pegawai Negeri Sipil.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pada saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan daerah yang berinisiatif mengembangkan G2G, kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu.

- a. Di dalam mengembangkan G2G di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu belum menunjukkan tahap kesempurnaan. Di dalam pengembangan G2G masih terdapat beberapa kelemahan yang dilihat dengan tiga elemen sukses pengembangan *e-government*. Elemen pertama yaitu *support*, pada elemen ini meliputi *political will* berupa peraturan di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu seputar pengembangan G2G telah dijalankan namun belum maksimal karena secara rinci

terfokus pada *e-government*, pengembangan infrastruktur TIK di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sejauh ini masih terus dilakukan pengoptimalan dan belum memadai, sosialisasi keintegrasian data dan informasi antar SKPD di sudah dilakukan, namun pada penerapannya baru hanya melalui portal resmi SKPD dan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Elemen yang kedua yaitu *capacity*, pada elemen ini meliputi ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu masih kurang dan pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang tersedia, sumber daya *financial* dalam pengembangan G2G masih sedikit terutama dalam pelatihan dan pengembangan SDM TI, serta ketersediaan infrastruktur jaringan yang belum memadai sehingga keintegrasian antar SKPD belum sepenuhnya terlaksana. Elemen ke tiga adalah *value*, pengembangan G2G memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

- b. Pengembangan G2G di Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi Keamanan yakni Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini telah melakukan otorisasi pengaksesan penggunaan, perubahan serta ketersediaan data dan Informasi dalam G2G saat dibutuhkan pengguna, Budaya Organisasi bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu memiliki komitmen untuk

mewujudkan *good governance* melalui G2G yang sejalan dengan visi dan misi yaitu “Mewujudkan *Smart City* yang Prima dalam penyelenggaraan Pemerintahan (*Government*), Pelayanan Publik (*Citizen*) dan Daya Beli (*Business*)”, serta Pelatihan yakni keseriusan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam pengembangan G2G melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sangat tinggi yang dilihat dari program pelatihan yang direncanakan, meskipun dalam realisasinya terdapat kendala dalam penganggaran dana. Sedangkan faktor penghambat meliputi *People Power* yakni operasionalisasi G2G tidak berjalan lancar ditandai dengan keintegrasian setiap SKPD di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu belum sepenuhnya terlaksana, *Hardware* yakni ketersediaan infrastruktur jaringan dalam penerapan G2G di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu masih belum maksimal hanya sebatas peralatan dan mesin kantor, terbentuknya aplikasi-aplikasi G2G, dan perangkat Data Center, sedangkan koneksi jaringan antar SKPD baru sebagian saja, dan *Organoware* yakni adanya kendala birokrasi dalam pengembangan G2G di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang ditandai dengan kultur yang ada dalam tubuh birokrasi sipil masih sulit untuk berubah dikarenakan penilaian kemungkinan kehilangan yang akan dihasilkan dari penerapan *e-government* tersebut terhadap individu Pegawai Negeri Sipil.

2. Saran

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu, segera merencanakan pengajuan anggaran pengelolaan *e-government* melalui layanan G2G agar bisa menuju proses memaksimalkan upaya pengumpulan, pengorganisasian dan publikasi data dan informasi dari masing-masing SKPD ke Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga memudahkan pengintergrasian dan pengumpulan data yang lebih baik, efisien dan efektif, serta akuntabel.
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu harus memperhatikan faktor penentu tingkat kesiapan dalam pengembangan *e-government* melalui layanan G2G yakni meningkatkan infrastruktur telekomunikasi dengan tingkat konektivitas seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, serta perlu meningkatkan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas melalui pelatihan-pelatihan, bekerjasama dengan pihak luar yang lebih berkompeten di bidang teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Bungin, B. (2011). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. In *Kencana*.
- Gamlo, A., & Bamasak, O. (2011). A multi-tier framework for securing e-transactions in e-government systems of Saudi Arabia. *International Journal of Electronic Finance*, 5(2), 126–149. <https://doi.org/10.1504/IJEF.2011.040457>
- Hidayat, Antol; Aisyah, S., & Weningsih, S. (2019). Implementasi E-Government dalam Administrasi Pemerintahan Di Kabupaten Banyumas. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). http://repository.ut.ac.id/6158/1/2011_34.pdf
- Indrajit, R. E. (2006). *Electronic Government Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*. XIX, 1–93.
- Indrajit, R. E. (2007). *Electronic Government in Action*. 195. <http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150>
- Kemkominfo. (2004). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*. 2004.
- Kurnia, J. A. O. G. M. M. L. N. P. ; H. (2014). *Sistem informasi manajemen (Management information systems)* (Sembilan). Salemba Empat.
- Maria, A. E. (2005). Konsep E-Government : Tantangan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat. *Seminar, 2005(Snati)*.
- Nasution, S. (2016). *Metode Research : Penelitian Ilmiah*. In *Jakarta: Bumi Aksara*.

- Novita, D. (2014). Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan E-Government. *Eksplora Informatika*, 4(1), 43–52.
- Nurdin, I. S. H. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*.
- Nurdin, N., Stockdale, R., & Scheepers, H. (2011). organizational barriers influencing local electronic government adoption and implementation: The electronic government implementation framework. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 6(3), 13–27. <https://doi.org/10.4067/S0718-18762011000300003>
- Putri, F. M. (2017). *Pengembangan Sistem Go+ Berbasis Yii2 Framework Sebagai Media Informasi Untuk Kepala Divisi Keuangan Pada Perguruan Tinggi*. <https://widuri.raharja.info/index.php?title=SI1312475680>
- Sirat, B. I. (2013). Analisis Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Government to Government Electronic Government (G2G E-Gov) di Indonesia Studi Kasus : Komandan SIKD. *Dirjen Perimbangan Keuangan*. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/528/Makalah_Penelitian_G2GeGovSuccessFactor_published.pdf
- Smith, S., & Jamieson, R. (2005). Key factors in e-government information system security. *18th Bled EConference EIntegration in Action - Conference Proceedings*, 1–15.
- Sugiyono, P. D. (2016). metode penelitian kuantitatif, kualitatif,dan R&D. In *Alfabeta, cv*.
- Suyanto, B. S. (2016). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai alternatif Pendekatan* (Tiga). Kencana. <http://202.162.35.204:8191/opac/DetailOpacBlank.aspx?id=5880>
- Thoha, M. (2009). *Perilaku organisasi: konsep dasar dan aplikasinya* (Pertama). Rajawali Grafindo Persada.
- Tuah Fitriano Putra, D. (2020). Kapabilitas Dynamic Governance Dalam Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 – 2017. *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 144–176. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i2.1460>
- Peraturan :**
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 59 dan Tambahan No. 4844).
- Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 61 dan Tambahan No. 4846).
- Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*.
- Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem

- Pemerintahan Berbasis Elektronik (*SPBE*).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.
- Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
- Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika.
- Peraturan Bupati Indragiri Hulu No. 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu.
- Master Plan ICT Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2021.
- Jurnal :**
- Bungin, B. (2011). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. In *Kencana*.
- Gamlo, A., & Bamasak, O. (2011). A multi-tier framework for securing e-transactions in e-government systems of Saudi Arabia. *International Journal of Electronic Finance*, 5(2), 126–149. <https://doi.org/10.1504/IJEF.2011.040457>
- Hidayat, Antol; Aisyah, S., & Weningsih, S. (2019). Implementasi E-Government dalam Administrasi Pemerintahan Di Kabupaten Banyumas. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). http://repository.ut.ac.id/6158/1/2011_34.pdf
- Indrajit, R. E. (2006). *Electronic Government Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*. XIX, 1–93.
- Indrajit, R. E. (2007). *Electronic Government in Action*. 195. <http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150>
- Kemkominfo. (2004). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*. 2004.
- Kurnia, J. A. O. G. M. M. L. N. P. ; H. (2014). *Sistem informasi manajemen (Management information systems)* (Sembilan). Salemba Empat.
- Maria, A. E. (2005). Konsep E-Government : Tantangan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat. *Seminar, 2005(Snati)*.
- Nasution, S. (2016). Metode Research : Penelitian Ilmiah. In *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Novita, D. (2014). Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan E-Government. *Eksplora Informatika*, 4(1), 43–52.
- Nurdin, I. S. H. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*.
- Nurdin, N., Stockdale, R., & Scheepers, H. (2011). Understanding organizational barriers influencing local

- electronic government adoption and implementation: The electronic government implementation framework. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 6(3), 13–27. <https://doi.org/10.4067/S0718-18762011000300003>
- Putri, F. M. (2017). *Pengembangan Sistem Go+ Berbasis Yii2 Framework Sebagai Media Informasi Untuk Kepala Divisi Keuangan Pada Perguruan Tinggi*. <https://widuri.raharja.info/index.php?title=SI1312475680>
- Sirat, B. I. (2013). Analisis Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Government to Government Electronic Government (G2G E-Gov) di Indonesia Studi Kasus : Komandan SIKD. *Dirjen Perimbangan Keuangan*. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/528/Makalah_Penelitian_G2GeGovSuccessFactor_published.pdf
- Smith, S., & Jamieson, R. (2005). Key factors in e-government information system security. *18th Bled EConference EIntegration in Action - Conference Proceedings* , 1–15.
- Sugiyono, P. D. (2016). metode penelitian kuantitatif, kualitatif,dan R&D. In *Alfabeta, cv*.
- Suyanto, B. S. (2016). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai alternatif Pendekatan* (Tiga). Kencana. <http://202.162.35.204:8191/opac/DetailOpacBlank.aspx?id=5880>
- Thoha, M. (2009). *Perilaku organisasi: konsep dasar dan aplikasinya* (Pertama). Rajawali Grafindo Persada.
- Tuah Fitriano Putra, D. (2020). Kapabilitas Dynamic Governance Dalam Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 – 2017. *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 144–176. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i2.1460>